



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) TAHUN 2021



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI RIAU**



GUBERNUR RIAU

**PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 52 TAHUN 2020**

**TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, setiap Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah diamanatkan untuk menyusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2020;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
15. Peraturan Gubernur Riau Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2021.**

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 dan dokumen lainnya yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : HASIL EVALUASI TAHUN 2019
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 18 Agustus 2020

GUBERNUR RIAU,

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 18 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

YAN PRANA JAYA

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2020 NOMOR :

DAFTAR ISI

Daftar Isi		i
Daftar Tabel		ii
BAB I.	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	5
	1.3. Maksud dan Tujuan	7
	1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II.	HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019	
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	12
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
	2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	26
	2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	27
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
BAB III.	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	36
	3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	37
	3.3. Program dan Kegiatan	40
BAB IV.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	51
BAB V.	PENUTUP	57
Lampiran I	HASIL VERIFIKASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) PROVINSI RIAU TAHUN 2021	
Lampiran II	HASIL PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KE PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 Provinsi Riau	13
Tabel 2.2	Capaian Indikator Kinerja Utama	20
Tabel 2.3	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	21
Tabel 2.4	Jumlah Anggota DPRD Provinsi Riau menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin Tahun 2019	21
Tabel 2.5	Jumlah Anggota DPRD Provinsi Riau menurut Kab/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2019	22
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2019	23
Tabel 2.7	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Provinsi Riau	28
Tabel 2.8	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019 Provinsi Riau	34
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2021	38
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Provinsi Riau	45
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Provinsi Riau	52

BAB I

PENDAHULUAN

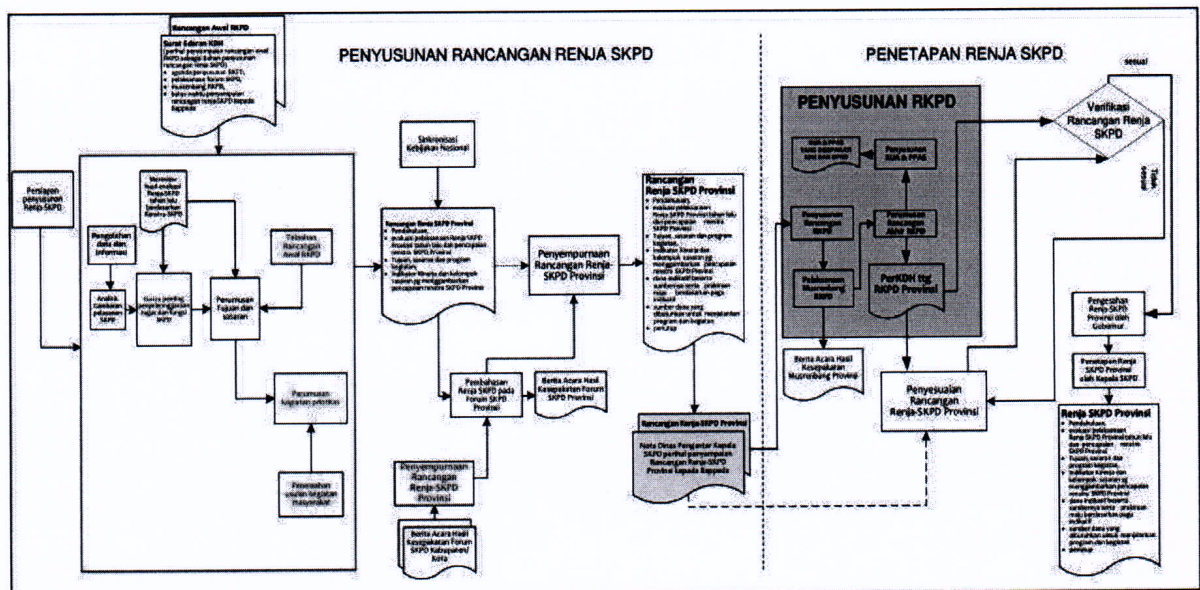
1.1. Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Perangkat Daerah ini juga merupakan sebuah dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Secara hierarki penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan;

3. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD;
4. Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas perangkat daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, progam dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran;
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD;
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD ditetapkan.



Gambar 1.1 . Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah

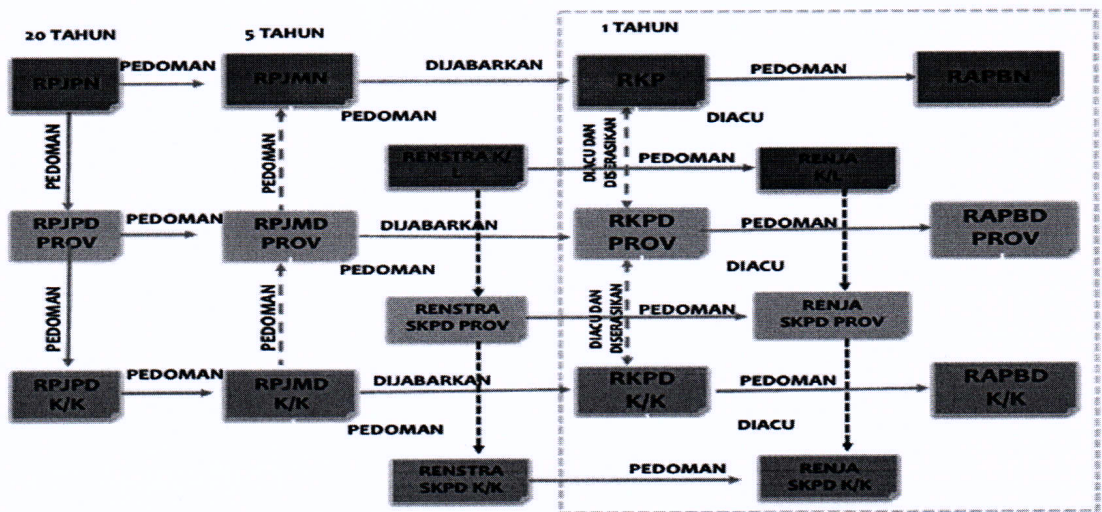
Dalam penyusunannya rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat

Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan;
2. Program dalam Rencana Kerja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada tahun berkenaan;
3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang);
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

Selanjutnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, alur sinkronisasi perencanaan penganggaran pusat dan daerah dalam satu kesatuan Sistem Informasi dan Manajemen Perencanaan Pembangunan Nasional (SIMRENAS) dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 1.2
Pola Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan dengan Renja Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD adalah salah satu organisasi perangkat daerah di Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau Provinsi Riau.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas “menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan”.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan PD dalam rangka evaluasi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditentukan pada APBD Murni tahun berjalan untuk mewujudkan misi ke-5 Gubernur Riau seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024, yaitu :

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi”

Penyusunan Rencana kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 dimaksudkan untuk mengefektifkan pelaksanaan kegiatan serta upaya meningkatkan kualitas pelayanan terhadap tugas-tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2021 memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemeirntah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 12);

11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 11);
13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau;
14. Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Gubernur Riau Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2021;
16. Peraturan Gubernur Riau Nomor 52 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau tahun 2021 adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Provinsi Riau di tahun 2021 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan dari penyusunan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Riau tahun 2021 ini adalah :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Riau untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra 2019 - 2024 dan RPJMD Provinsi Riau di tahun 2021;
2. Sebagai instrument akuntabilitas kinerja di tahun 2021 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan laporan kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau ini disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dengan subbab sebagai berikut :

- 1.1. Latar Belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD;
- 1.2. Landasan Hukum memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah;
- 1.3. Maksud dan Tujuan memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah;
- 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan capaian renstra perangkat daerah, analisa kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, revier terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dengan subtansi bab sebagai berikut :

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah menguraikan realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, dan tabel T-C.29;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah menguraikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK dan lampiran table T-C.30;
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah menguraikan tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/

internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*), Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan;

- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD menguraikan Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda, lampiran tabel T-C.31;
- 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat menguraikan Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh, penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, lampiran tabel T-C.32.

Bab III. Tujuan dan sasaran perangkat daerah memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah, dan program dan kegiatan dengan substansi bab sebagai berikut:

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional menguraikan tentang penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah menguraikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah;

3.3 Program dan Kegiatan menguraikan faktor- faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya, lampiran tabel T-C.33.

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah memuat Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 diambil dari Sistem i-Planning pada Tahapan Final RKPD.

Bab V. Penutup memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah dan Kebijakan/tindakan perencanaan serta penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Rencana kerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau adalah penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Sekretariat DPDR Provinsi Riau. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Terkait dengan hal tersebut dapat diuraikan pada Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2020 sebagaimana pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Provinsi Riau**

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Provinsi Riau

No	Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra pada Tahun 2015 s/d 2019	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun (2015 s/d 2018)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Di Evaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)
							I	II	III	IV				
1	0	Non Urusan	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 6+12	15
	0	NON URUSAN												
1	0 0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-											
	0.00	0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	19703 Surat	115.970	84.046	11.400	0	11.400	57.000	79.800	94,95	195770	993,61
	0.00	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Rentang waktu penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	60 Bulan	48	12	3	3	3	3	12	100,00	60	100
	0.00	0003 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	16 Unit	14	2.318	0	550	0	1.768	2.318	100,00	2332	14575
	0.00	0006 Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	703 Unit	517	82	8	15	5	49	77	93,90	594	84,50
	0.00	0007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang disediakan	0 Orang	76.002	2	1	0	1	0	2	100,00	76004	0
	0.00	0008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	60 Bulan	48	12	3	3	3	3	12	100,00	60	100
	0.00	0010 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rentang waktu penyediaan alat tulis kantor	60 Bulan	48	12	3	3	0	0	6	50,00	54	90

No	Kode		Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra pada Tahun 2015 s/d 2019	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun (2015 s/d 2018)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang DI Evaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Peringkat Daerah s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Peringkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)
	2	3						4	5	6	7	8				
1	0.00	00	001	011	60	48	7	8	9	10	11	12	13	14 = 6+12	15	
	0.00	00	001	012	60	36	12	0	3	3	6	12	100,00	60	100	
	0.00	00	001	013	335	714	100	0	0	0	0	0	0,00	714	213,13	
	0.00	00	001	015	60	48	12	3	0	3	3	9	75,00	57	95	
	0.00	00	001	017	681803	735.554,19	243.954	36.700	42.500	42.500	92.000	213.700	87,60	949254	139,23	
	0.00	00	001	018	52	46	12	3	3	3	4	13	108,33	59	113,46	
	0.00	00	001	019	60	48	12	3	3	3	3	12	100,00	60	100	
	0.00	00	001	022	60	48	12	3	3	3	3	12	100,00	60	100	
	0.00	00	001	298	0	0	12	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2	0	0	0	2												

No	Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra pada Tahun 2015 s/d 2019	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2018 (2018 s/d)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Di Evaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)	Realisasi dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019 (2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)
							I	II	III	IV				
1	0.00	0006	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 6+12	15
		0006	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan	115 Unit	103	20	0	0	0	14	14	70,00	117	101,74
	0.00	0007	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	83 Unit; Paket	115	10	0	0	10	5	15	150,00	130	156,63
	0.00	0009	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	32 Unit;Paket	232	29	0	0	0	0	0	0,00	232	725,00
	0.00	0010	Jumlah meubeleur yang diadakan	64 Unit	42	119	0	0	0	34	34	28,57	76	118,75
	0.00	0020	Jumlah Rumah Jabatan yang dipelihara	51 Unit	16	4	0	2	1	1	4	100,00	20	39,22
	0.00	0022	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	5 Gedung	4	1	1	0	0	0	1	100,00	5	100,00
	0.00	0024	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	364 Unit	222	36	3	15	15	3	36	100,00	258	70,88
	0.00	0028	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	22 Jenis	544	22	2	0	5	15	22	100,00	566	2572,73
3	0	0	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
	0.00	0005	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	0 Orang	158	3					0	0,00	158	0
	0.00	0012	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	60 Bulan	48	12	3	3	3	3	12	100,00	60	100
	3		PENUNJANG URUSAN											
	3	1	PERENCANAAN PEMBANGUNAN											

No	Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra pada Tahun 2015 s/d 2019	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun (2015 s/d 2018)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Di Evaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019(%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)
							I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 6+12	15
4	15	Program Pengembangan Data/Informasi	-	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 6+12	15
	01	Partisipasi Dalam Pelaksanaan pameran tahunan	Jumlah / frekuensi Pameran Tahunan yang diikuti	5 Kali	4	1	0	0	0	1	1	100,00	5	100
	2	PENDUKUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT												
5	26	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	-											
	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang dibahas.	81 Ranperda	34	6	2	2	1	1	6	100,00	40	49,38
	02	Hearing/ Dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah Dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama	Jumlah Hearing/Dialog dan Koordinasi yang dilakukan	48 Hearing/Dialog; Koordinasi	30	26	7	8	8	1	24	92,31	54	112,50
	02	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah Rapat Alat Kelengkapan Dewan yang dilaksanakan	2515 Kali Rapat	1.539	342	47	47	47	201	342	100,00	1881	74,79
	02	Rapat-Rapat Paripurna	Jumlah Rapat Paripurna	305 Kali	174	50	1	25	20	4	50	100,00	224	73,44
	02	Kegiatan Reses	Jumlah Reses	15 Kali	12	2	1	0	0	1	2	100,00	14	93,33
	02	Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Mengikuti BinteK, Workshop, Seminar dan Teamwork Assessment	325 Orang	260	5	1	2	1	1	5	100,00	265	81,54

No	Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra pada Tahun 2015 s/d 2019	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun (2015 s/d 2018)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Di Evaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)
							I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 6+12	15
4.00	02	009	Pembahasan LKPJ, Pembahasan Pertanggungjawaban APBD, Pembahasan APBD-P Dan Pembahasan APBD	23 Perda	17	5	1	2	1	1	5	100,00	22	95,65
4.00	02	010	Penyediaan Tenaga Ahli Dan Advokasi	338 Orang	228	62	4	23	23	12	62	100,00	290	85,80
4.00	02	011	Penyusunan Ranperda Yang Berasal Dari DPRD Provinsi Riau	78 Ranperda	40	3	1	2	0	0	3	100,00	43	55,13
4.00	02	013	Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan	218 Kali	184	61	11	15	15	20	61	100,00	245	112,39
4.00	02	014	Penyediaan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Riau	30 Kali	11	2	0	0	1	1	2	100,00	13	43,33
4.00	02	015	Kunjungan Luar Negeri Pimpinan Dan Anggota DPRD Prov. Riau	5 Kali	4	1	0	0	1	0	1	100,00	5	100,00
4.00	02	016	Rapat Koordinasi Dan Komunikasi Pimpinan Dan Sekretaris DPRD Riau	15 Kali	16	2	1	0	1	0	2	100,00	18	120,00
4.00	02	017	Program Legislasi Daerah Provinsi Riau	145 Kali	74	12	1	3	4	4	12	100,00	86	59,31
4.00	02	018	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	581 Kali	337	55	14	14	20	7	55	100,00	392	67,47

No	Kode	Usuran/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra pada Tahun 2015 s/d 2019	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun (2015 s/d 2018)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Di Evaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)	Realisasi dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)
							I	II	III	IV	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 6+12	15	
	4.00	02	026	195 Orang	58	65	0	0	0	65	65	100,00	123	63,08	
			Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarga yang mendapatkan Jasa Perawatan Kesehatan (Medical Check Up)												
	4.00	02	028	345 Kali	195	263	28	25	35	175	263	100,00	458	132,75	
			Penyelenggaraan Keprotokolan Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan												
	4.00	02	029	24 Kali	10	10	1	3	0	0	4	40,00	14	58,33	
			Konsolidasi Hubungan Antar Lembaga												
	4.00	02	032	0 Rumah Tangga	0	4	1	1	1	1	4	100,00	4	0,00	
			Penyediaan Logistik Rumah Tangga Pimpinan DPRD												

Dari Hasil Evaluasi Renja Triwulan IV pada Tabel 2.1 tersebut, maka disimpulkan bahwa :

- 1) Rendahnya realisasi keuangan disebabkan adanya rencana pengurangan anggaran, penyesuaian target kinerja kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, serta adanya keterlambatan penyampaian laporan pertanggung jawaban.
- 2) Untuk memenuhi capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam rencana strategis perlu dilakukan penyesuaian anggaran dan indikator target agar hasil pelaksanaan kegiatan mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta meminimalisir sisa lebih pagu anggaran pada akhir tahun anggaran.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama atau *Key Performance Indicators* adalah serangkaian indikator kinerja yang mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi atau ukuran keberhasilan yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis. Dalam Renstra Tahun 2019-2024, Sekretariat DPRD Provinsi Riau menyusun formulasi indikator-indikator kinerja serta merumuskan Indikator Kinerja Utama berdasarkan rangkaian indikator kinerja program/kegiatan yang dihimpun dalam diagram cascading.

Berdasarkan sasaran strategis maka Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Provinsi Riau sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Utama

NO.	PERANGKAT DAERAH	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU	Meningkatkan Pelayanan Bagi Peningkatan Kapasitas Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau	Meningkatnya Layanan Terhadap Lembaga DPRD Provinsi Riau	Indeks Kepuasan Layanan kepada Lembaga DPRD	Angka Indeks Layanan Kepuasan / 65 Anggota DPRD	72

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarnya. Penetapan indikator kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Adapun Capaian Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau yaitu *reformasi birokrasi* melalui strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Integritas Aparatur, serta Akuntabilitas dalam melayani tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau dengan indikator kinerja setiap tahunnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR/KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
	2020	2021	2022	2023	2024		
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH							
Indeks Kepuasan Layanan Kepada Lembaga DPRD	73	74	75	76	77	77	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU
Persentase capaian layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	91	92	93	94	95	95	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU
Persentase capaian layanan terhadap hak-hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD	91	92	93	94	95	95	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU
Persentase capaian layanan terhadap peningkatan kapasitas	91	92	93	94	95	95	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU
Presentase peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	91	92	93	94	95	95	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi Riau. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau beranggotakan 65 Orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pimpinan DPRD Provinsi Riau terdiri dari 1 (satu) Orang Ketua dan 3 (tiga) Orang Wakil Ketua yang berasal dari Partai Politik dengan jumlah kursi terbanyak. Jumlah Anggota DPRD Provinsi Riau saat ini berdasarkan Partai Politik dan Kota/Kabupaten adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Jumlah Anggota DPRD Provinsi Riau Sesuai Partai Politik dan Jenis Kelamin Tahun 2019

Partai Politik	2019		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Partai Demokrat	8	1	9
Partai Golongan Karya	7	4	11
Partai Hati Nurani Rakyat	1	0	1
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8	2	10

Partai Politik	2019		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Partai Gerakan Indonesia Raya	8	0	8
Partai Amanat Nasional	5	2	7
Partai Nasdem	1	1	2
Partai Kebangkitan Bangsa	6	0	6
Partai Keadilan Sejahterah	5	2	7
Partai Bulan Bintang	0	0	0
Partai Persatuan Pembangunan	4	0	4
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0	0	0
Provinsi Riau	53	12	65

Tabel 2.5
Jumlah Anggota DPRD Provinsi Riau Sesuai Kab/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2019

Kab/Kota	2019		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Kuantan Singingi	34	1	35
Indragiri Hulu	39	1	40
Indragiri Hilir	39	6	45
Pelalawan	35	0	35
Siak	39	1	40
Kampar	41	4	45
Rokan Hulu	43	2	45
Bengkalis	41	4	45
Kep. Meranti	37	8	45
Rokan Hilir	26	4	30
Pekanbaru	90	20	110
Dumai	27	3	30
Provinsi Riau	53	12	65

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2019

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		
1	Indeks Kepuasan Layanan kepada Lembaga DPRD	-	-	70	72	73	74	72	-	73	74		

Sebagaimana Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 bahwa di Tahun 2019 Sekretariat DPRD Provinsi Riau menetapkan besaran Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Kepuasan Layanan sebesar 70 Point.

Setelah dilakukan pengukuran kinerja oleh tim melalui metode survey dan wawancara kepada 65 anggota DPRD, maka diperoleh hasil survey nilai indeks kepuasan layanan di akhir tahun 2019 dengan nilai realisasi kinerja sebesar 72 Point atau kategori BAIK.

Metode yang digunakan untuk memperoleh angka indeks tersebut dilakukan melalui metode penyebaran kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan unsur pelayanan umum yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Riau dengan memperhatikan 12 unsur pelayanan antara lain :

- a. Persyaratan pelayanan;
- b. Kemudahan Prosedur Pelayanan;
- c. Kecepatan Pelayanan;
- d. Kesesuaian Pelaksanaan Pelayanan dan Standar Pelayanan;
- e. Keseuaian antara hasil pelayanan dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- f. Kemampuan petugas dalam pelayanan;
- g. Kesopanan dan keramahan petugas;
- h. Kesesuaian antara pelaksanaan pelayanan yang diberikan dengan maklumat yang ditetapkan;
- i. Penanganan terhadap pengaduan, saran dan masukan.

Sedangkan untuk unsur pelayanan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan meliputi:

- a. Pelayanan dalam bidang umum
- b. Pelayanan dalam bidang risalah dan produk hukum
- c. Pelayanan dan bidang keuangan dan perencanaan

Perolehan angka indeks dihitung berdasarkan ketentuan unsur- unsur pelayanan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap

Penyelenggaraan pelayanan Publik dengan mempertimbangkan unsur pelayanan berdasarkan tugas pokok dan fungsi digabung maka unsur pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Riau di Tahun 2019 mempunyai nilai kinerja sebesar berada dalam 72 Point kategori BAIK.

Dari capaian kinerja tersebut diketahui bahwa target yang direncanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Riau di tahun 2019 yaitu sebesar 70 Point telah terpenuhi dan bahkan memperoleh capaian kinerja melebihi target sebesar 2 Point.

Untuk lebih detailnya, capaian kinerja sebesar 72 Point dengan unsur pelayanan mempertimbangkan TUPOKSI dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Nilai rata-rata persepsi pelayanan yang diperoleh Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Riau sebesar 75,36 dengan interpretasi pelayanan sudah baik tapi perlu ditingkatkan kualitas pelayanannya.
- b. Nilai rata-rata persepsi pelayanan yang diperoleh Bagian Risalah dan Produk Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Riau sebesar 72,77 dengan interpretasi pelayanan sudah baik tapi perlu ditingkatkan kualitas pelayanannya.
- c. Nilai rata-rata persepsi pelayanan yang diperoleh Bagian Keuangan dan Perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi Riau sebesar 74,93 dengan interpretasi pelayanan sudah baik tapi perlu ditingkatkan kualitas pelayanannya.

Dari Nilai rata-rata persepsi yang diperoleh dari 3 (tiga) bagian di Sekretariat DPRD Provinsi Riau dapat diketahui bahwa 3 (tiga) bagian tersebut telah melampaui capaian kinerjanya, tetapi diharapkan Bagian-baian tersebut lebih dapat meningkatkan layanannya kepada segenap anggota DPRD. Serta apabila ke 3 (tiga) angka indeks tersebut diatas diakumulasikan ke dalam angka IKM, maka diperoleh angka 72.

Diharapkan ditahun 2019 dan 2020 Program dan Kegiatan menjadi lebih baik dari perencanaan, pelaksanaan dan pembiayaannya melalui APBD sehingga dapat lebih meningkatkan nilai Indeks Kepuasan Layanan Terhadap DPRD.

2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Mengacu pada tugas pokok dan fungsinya, maka peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dalam memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sangatlah penting, karena kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD selaku entitas penting dalam pembangunan daerah juga ditentukan oleh kenyamanan dan kelancaran fasilitas terhadap pelaksanaan tiap-tiap kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD

Dari uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi perhatian atau fokus utama dalam penentuan isu-isu strategis pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau adalah :

Faktor Internal :

- a. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal;
- b. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- c. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia;
- d. Layanan Sekretariat DPRD dalam menunjang kinerja DPRD masih kategori baik tapi masih perlu ditingkatkan kualitas pelayanannya. Hal ini tentunya akan memacu Sekretariat DPRD dalam melakukan upaya peningkatan mutu pelayanan.

Faktor Eksternal :

- a. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD;
- b. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis;
- c. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan;
- d. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya;

- e. Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD.

Untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang langkah-langkah antisipasi yang perlu diambil adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas SDM lebih intensif melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan;
2. Melakukan formasi pegawai secara efektif dan efisien guna mendukung kinerja SKPD;
3. Mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perumusan rancangan awal RKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau disusun berdasarkan arahan/panduan yang diberikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau, yang kemudian dibahas secara bersama-sama melalui Forum Perangkat Daerah, untuk kemudian dibahas pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Provinsi Riau

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Provinsi Riau

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BELANJA LANGSUNG				256.347.273.236,87	BELANJA LANGSUNG				357.960.571.805,00	
	PENDUKUNG				256.347.273.236,87	PENDUKUNG				357.960.571.805,00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	21.565.001.537,31	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	22.975.589.700,00	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pekanbaru	Jumlah surat yang dikirim	84,046 Surat	63.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pekanbaru	Jumlah surat yang dikirim	84,046 Surat	63.000.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pekanbaru	Jumlah rekening yang dibayar	192 Rekening	4.200.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pekanbaru	Jumlah rekening yang dibayar	192 Rekening	3.000.000.000	
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pekanbaru	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60 Unit	31.500.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pekanbaru	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60 Unit	31.500.000	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pekanbaru	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	2.625.000.000,00	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pekanbaru	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	3.377.786.500	
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pekanbaru	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	58 unit	109.987.500,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pekanbaru	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	58 unit	160.000.000	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pekanbaru	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	62 Jenis	1.203.070.995,00	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pekanbaru	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	62 Jenis	800.000.000	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pekanbaru	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	175 Jenis	630.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pekanbaru	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	175 Jenis	630.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pekanbaru	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	25 Jenis	577.500.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pekanbaru	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	25 Jenis	577.500.000	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pekanbaru	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	243,954 Porsi	4.833.323.042,31	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Pekanbaru	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	260000 Porsi	5.342.688.000	
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar Provinsi Riau	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	28 Kali	1.575.000.000,00	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Luar Provinsi Riau	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	28 Kali	1.575.000.000	
11	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Pekanbaru	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan	4,826 OB	2.566.620.000,00	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Pekanbaru	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan	1.443 OB	2.869.094.000	
12	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Pekanbaru	Jumlah tenaga satpam yang disediakan	852 OB	3.150.000.000,00	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Pekanbaru	Jumlah tenaga satpam yang disediakan	852 OB	4.549.021.200	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100%	10.693.142.164,44	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100%	23.198.510.000,00	
3	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Pekanbaru	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	20 Unit	482.880.000,00	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Pekanbaru	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	20 Unit	482.880.000	
4	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pekanbaru	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	150 Unit	480.000.000,00	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pekanbaru	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	150 Unit	300.000.000	
5	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Pekanbaru	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang diadakan	15 Unit	1.038.468.000,00	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Pekanbaru	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang diadakan	15 Unit	800.000.000	
6	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pekanbaru	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	10 Unit	2.955.794.164,44	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pekanbaru	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	251 Unit	16.000.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Pekanbaru	Jumlah Rumah Jabatan yang dipelihara	2 Unit	1.080.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Pekanbaru	Jumlah Rumah Jabatan yang dipelihara	2 Unit	1.080.000.000	
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pekanbaru	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	1 Ruang	1.800.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pekanbaru	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	1 Gedung	1.800.000.000	
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pekanbaru	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	30 Unit	2.040.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pekanbaru	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	30 Unit	1.995.630.000	
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan rumah jabatan/Dinas	Pekanbaru	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	4 Unit	360.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan rumah jabatan/Dinas	Pekanbaru	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	360 Unit	360.000.000	
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pekanbaru	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	18 Unit	456.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pekanbaru	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	445 Unit	380.000.000	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase Tingkat Kehadiran ASN	100%	246.940.405,01	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase Tingkat Kehadiran ASN	100%	246.940.405,00	
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Pekanbaru	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	195 Stel	103.615.405,01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Pekanbaru	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	195 Stel	103.615.405	
2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Pekanbaru	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	195 Stel	143.325.000,00	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Pekanbaru	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	195 Stel	143.325.000	
	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT					DEWAN PERWAKILAN RAKYAT					
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	92%	223.842.189.130,11	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	92%	311.539.531.700,00	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Pekanbaru	Jumlah Rapat Konsultasi	1 Dokumen	4.494.000.000,00	Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Program Pembentukan Peraturan Daerah	17 Dokumen	4.494.000.000	
2	Penyusunan Ranperda Inisiatif DPRD Provinsi Riau	Pekanbaru	Jumlah Ranperda inisiatif DPRD Provinsi Riau	6 Ranperda Inisiatif DPRD	6.420.000.000,00	Penyusunan Ranperda inisiatif DPRD Provinsi Riau	Pekanbaru	Jumlah Ranperda inisiatif DPRD Provinsi Riau	7 Ranperda Inisiatif DPRD	6.420.000.000	
3	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Pekanbaru	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang dibahas	6 Ranperda	6.420.000.000,00	Pembahasan rancangan Peraturan Daerah	Pekanbaru	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang dibahas	8 Ranperda	9.609.888.000	
4	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Pekanbaru	Jumlah Rapat Alat Kelengkapan Dewan	342 Kali	746.646.000,00	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Pekanbaru	Jumlah rapat alat kelengkapan dewan yang dilaksanakan	534 Kali	1.175.400.000	
5	Rapat-Rapat Paripurna	Pekanbaru	Jumlah Rapat Paripurna	61 Kali	1.070.000.000,00	Rapat-Rapat Paripurna	Pekanbaru	Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan	61 Kali	872.620.000	
6	Reses Pimpinan dan Anggota DPRD	Provinsi Riau	Jumlah Jumlah reses Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Kali	74.000.000.000,00	Reses Pimpinan dan Anggota DPRD	Provinsi Riau	Jumlah reses Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Kali	74.000.000.000	
7	Pembahasan LKPJ, APBD dan Perubahan APBD, Pertanggungjawaban APBD, serta Tindak Lanjut LHP BPK RI	Pekanbaru	Jumlah Jumlah rekomendasi	5 Perda/ Rekomendasi	8.232.927.437,56	Pembahasan LKPJ, APBD dan Perubahan APBD, Pertanggungjawaban APBD, serta Tindak Lanjut LHP BPK RI	Pekanbaru	Jumlah Perda dan rekomendasi	5 Perda/ Rekomendasi	11.447.006.000	
8	Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan	Dalam dan Luar Provinsi Riau	Jumlah Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan	50 Kali	39.000.000.000,00	Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan	Dalam dan Luar Provinsi Riau	Jumlah Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan	61 Kali	71.686.766.000	
9	Penyediaan Tenaga Ahli dan Advokasi	Pekanbaru	Tenaga Ahli, Kelompok Pakar / Tim Ahli, dan Advokasi	62 Orang	5.244.000.000,00	Penyediaan Tenaga Ahli dan Advokasi	Pekanbaru	Jumlah Tenaga Ahli dan Advokasi yang disediakan	68 Orang	6.264.000.000	
10	Penyediaan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD	Pekanbaru	Jumlah paripurna PAW Anggota DPRD Provinsi Riau	3 Kali	288.477.350,00	Penyediaan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD	Pekanbaru	Jumlah paripurna PAW Anggota DPRD Provinsi Riau	3 Kali	269.605.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	Provinsi Riau	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pimpinan dan anggota DPRD	Pekanbaru	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau yang Mendapatkan Jasa Perawatan (Medical Check Up)	65 Orang	395.200.000,00	Pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pimpinan dan anggota DPRD	Pekanbaru	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang Mendapatkan Jasa Perawatan Kesehatan (Medical Check Up)	65 Orang	395.200.000	
12	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau	Dalam dan Luar Provinsi Riau	Jumlah Kunjungan Pimpinan dan Anggota DPRD	45 Kali	28.470.669.342,55	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau	Dalam dan Luar Provinsi Riau	Jumlah Kunjungan Pimpinan dan Anggota DPRD	66 Kali	47.954.625.600	
13	Penyelenggaraan Keprotokolan Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan	Dalam dan Luar Provinsi Riau	Jumlah agenda keprotokolan pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan	300 Kali	1.605.000.000,00	Penyelenggaraan Keprotokolan Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan	Dalam dan Luar Provinsi Riau	Jumlah agenda keprotokolan pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan	350 Kali	2.000.000.000	
14	Penyediaan Logistik Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Pekanbaru	Rentang Waktu Penyediaan Logistik Rumah Tangga Pimpinan DPRD	12 Bulan	2.640.000.000,00	Penyediaan Logistik Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Pekanbaru	Rentang waktu ketersediaan logistik rumah tangga Pimpinan DPRD	12 Bulan	2.640.000.000	
15	Penyediaan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD	Pekanbaru	Jumlah pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD yang disediakan	325 Stel	985.000.000,00	Penyediaan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD	Pekanbaru	Jumlah pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD yang disediakan	325 Stel	985.000.000	
16	Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi dan Kehumasan Lembaga DPRD	Pekanbaru	Rentang waktu penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan	12 Bulan	5.350.000.000,00	Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi dan Kehumasan Lembaga DPRD	Pekanbaru	Rentang waktu penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan	12 Bulan	11.016.896.100	
17	Hearing/Dialog dan Sosialisasi Peraturan Daerah	Provinsi Riau	Hearing/Dialog dan Sosialisasi Peraturan Daerah	13 Kali	10.700.000.000,00	Hearing/Dialog dan Sosialisasi Peraturan Daerah	Provinsi Riau	Jumlah Hearing/Dialog dan Sosialisasi perda yang	11 Kali	33.354.970.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau	Dalam dan Luar Provinsi Riau	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Kali	8.121.626.000,00	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau	Dalam dan Luar Provinsi Riau	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	5 Kali	8.570.350.000	
19	Kunjungan Luar Negeri Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau	Luar Negeri	Jumlah Kunjungan ke Luar Negeri	1 Kali	18.164.643.000,00	Kunjungan Luar Negeri Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau	Luar Negeri	Jumlah Kunjungan Luar Negeri Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Kali	16.034.645.000	
20	Konsultasi dan Pengurusan Kunjungan Luar Negeri Pimpinan dan Anggota DPRD	Luar Provinsi Riau	Jumlah dokumen persyaratan kunjungan luar negeri Pimpinan dan Anggota DPRD	65 dokumen	642.000.000,00	Konsultasi dan Pengurusan Kunjungan Luar Negeri Pimpinan dan Anggota DPRD	Luar Provinsi Riau	Jumlah dokumen persyaratan kunjungan luar negeri Pimpinan dan Anggota DPRD	65 dokumen	1.398.560.000	
21	Peningkatan Kapasitas layanan Kepada Lembaga DPRD	Pekanbaru	Jumlah jasa penunjang layanan tugas dan fungsi lembaga DPRD	3 Laporan	210.000.000,00	Peningkatan Kapasitas layanan Kepada Lembaga DPRD	Pekanbaru	Jumlah jasa penunjang layanan tugas dan fungsi lembaga DPRD	3 Laporan	150.000.000	
22	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Acara/Resepsi Pimpinan DPRD	Pekanbaru	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan yang disewa	5 Jenis	214.000.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Acara/Resepsi Pimpinan DPRD	Pekanbaru	Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan yang disewa	5 Jenis	200.000.000	
23	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Pekanbaru	Jumlah koran/majalah dan peraturan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD	125000 Eks	428.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Pekanbaru	Jumlah koran/majalah dan peraturan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD	125000 Eks	600.000.000	
					256.347.273.236,87					357.960.571.805,00	

Setelah dilakukan Perumusan rancangan awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau terdapat penyesuaian kebutuhan anggaran dari total Pagu Indikatif Rp. 256.347.273.236,87 menjadi Rp. 357.960.571.805,00. Penyesuaian tersebut berdasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan dan dukungan terhadap anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya yaitu Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Provinsi Riau

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak melakukan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM,

Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi, karena tidak memiliki hubungan hierarki dan kepentingan secara langsung.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Nasional dan Kebijakan Pembangunan Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya, layanan public serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan Makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang yang terkait dengan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Riau, yaitu :

- a. Visi : Terwujudnya Pelayanan Prima terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau
- b. Misi : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.
- c. Tujuan : Meningkatkan Pelayanan Bagi Peningkatan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau

- d. Sasaran :
- Meningkatnya Layanan Terhadap Lembaga DPRD Provinsi Riau;
 - Meningkatnya Layanan Terhadap Hak-Hak Keuangan, Administratif, dan Keprotokolan DPRD;
 - Meningkatnya Layanan terhadap Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD.
- e. Strategi : Peningkatan kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap penyelenggaraan pelayanan Sekretariat Daerah.
- f. Kebijakan : Meningkatkan produktifitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD melalui kualitas SDM, peningkatan sarana dan prasarana, serta optimalisasi pengelolaan aset.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Sekretaris DPRD Provinsi Riau memiliki tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, memiliki tugas pokok sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan;
- b. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan pada bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut diatas, Sekretaris DPRD Provinsi Riau memiliki fungsi menyelenggarakan seperti; fungsi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, penyelenggaraan administrasi keuangan, fasilitasi penyelenggaraan rapat, penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Target capaian pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah pada Tahun 2021 mengacu pada Penetapan Kinerja pada Tahun 2020 yang dihubungkan dengan RKPD 2021. Dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Provinsi Riau yaitu;

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai Sekretariat DPRD
Provinsi Riau Tahun 2021

NO.	TUJUAN	SASARAN
1	2	3
1	Meningkatkan Pelayanan Kepada Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Layanan Tugas dan Fungsi Lembaga DPRD Provinsi Riau 2. Meningkatnya Layanan Hak-Hak Keuangan, Administratif, dan Keprotokolan DPRD 3. Meningkatnya Layanan Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau juga disusun melalui evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau pada tahun 2019

dengan membandingkan antara rencana/target dengan realisasi untuk masing-masing kegiatan sesuai kondisi ekonomi daerah.

Faktor-faktor yang menjadi bahan rumusan pada Rencana Kerja Tahun 2021 pada Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Provinsi Riau berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis yang terdapat dalam Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Riau, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Efisiensi dan rasionalisasi anggaran daerah;

Rencana efisiensi belanja Sekretariat DPRD Provinsi Riau sesuai kebijakan rasionalisasi anggaran terhadap menurunnya kemampuan keuangan daerah dan penyesuaian prioritas anggaran daerah.

2. Penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan tersebut berdampak terhadap meningkatnya kebutuhan anggaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD, sehingga dengan keterbatasan anggaran yang ada dipandang perlu melakukan penyesuaian belanja untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan pelayanan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD.

3. Meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan kualitas pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau;

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Provinsi Riau. Hal tersebut harus didukung dengan efektifitas belanja kegiatan melalui review anggaran kegiatan dan pelaporan.

4. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang tugas dan fungsi.

Untuk meningkatkan capaian kinerja dengan kemampuan keuangan yang makin menurun memerlukan perencanaan kinerja dan anggaran yang efektif.

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun. Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Sekretariat DPRD Provinsi Riau untuk mencapainya dalam sisa waktu tahun berjalan, dan merupakan tolok ukur bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Mengacu pada visi misi Gubernur Riau, faktor-faktor yang menjadi bahan rumusan pada rencana kerja tahun 2021 pada Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Provinsi Riau yaitu dalam misi 5 : Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi dengan tujuan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel.

Untuk mendukung tercapainya target Rencana Strategis pada tahun 2021 maka, dirumuskan program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana kerja sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2021, yaitu sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dimaksudkan untuk terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran dalam rangka mendukung tugas-tugas kesekretariatan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan melalui program ini, antara lain :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
- Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- Penyediaan Makanan dan Minuman;
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
- Penyediaan Jasa Administrasi Kantor;
- Penyediaan Jasa Keamanan Kantor.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dimaksud untuk peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang layak pakai untuk menunjang kegiatan dan tugas DPRD. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini, antara lain :

- Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas;
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
- Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas;
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan;
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas;
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

3. Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan disiplin aparatur melalui penyediaan pakaian dinas beserta atributnya. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini antara lain :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.

4. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Program ini di maksudkan untuk meningkatkan kapasitas kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah melalui pelayanan Sekretariat DPRD dan fasilitasi agenda-agenda rapat dewan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini, antara lain :

- Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- Penyusunan Ranperda inisiatif DPRD Provinsi Riau;
- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan;
- Rapat-Rapat Paripurna;
- Reses Pimpinan dan Anggota DPRD;
- Pembahasan LKPJ, APBD dan Perubahan APBD, Pertanggungjawaban APBD serta Tindak Lanjut LHP BPK RI;
- Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan;
- Penyediaan Tenaga Ahli dan Advokasi;
- Penyediaan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Riau;
- Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD;

- Penyelenggaraan Keprotokolan Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan;
- Penyediaan Logistik Rumah Tangga Pimpinan DPRD;
- Penyediaan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD;
- Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi, dan Kehumasan Lembaga DPRD;
- Hearing/Dialog dan Sosialisasi Peraturan Daerah;
- Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau;
- Kunjungan Luar Negeri Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau;
- Konsultasi dan Pengurusan Kunjungan Luar Negeri Pimpinan dan Anggota DPRD;
- Peningkatan Kapasitas Layanan kepada Lembaga DPRD;
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Acara/Resepsi Pimpinan DPRD;
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Adapun rumusan rencana kegiatan per program pada Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2021 diukur melalui Indikator kinerja yang merupakan indikator kinerja sasaran strategis Sekretariat DPRD Provinsi Riau. Nilai target tahun 2021 untuk masing-masing sasaran strategis ditetapkan sesuai target capaian yang dinyatakan dalam angka capaian realisasi atas indikator-indikator kinerja yang berorientasi kepada indikator kinerja sasaran.

Secara garis besar Perumusan Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2021 dengan Rancangan Awal RKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau terdapat perbedaan

pada total pagu indikatif. Perbedaan tersebut dikarenakan adanya penyesuaian kebutuhan anggaran pada masing-masing program dan kegiatan yang pada Rancangan Awal RKPD sebesar Rp. 256.347.273.236,37 dan setelah dilakukan penyesuaian kebutuhan anggaran menjadi Rp. 233.463.867.290,00.

Adapun pagu anggaran per program yang dilakukan penyesuaian yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 21.565.001.537,31 berkurang menjadi Rp. 20.236.873.748,00;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 10.693.142.164,44 berkurang menjadi Rp. 10.224.430.000,00;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar Rp. 246.940.405,01 berkurang menjadi 234.000.000,00;
4. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 223.842.189.130,11 berkurang menjadi Rp. 202.768.563.542,00.

Penetapan target kinerja dan pagu anggaran berdasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada. Target kinerja dan pagu anggaran untuk masing-masing program/kegiatan yang hendak dicapai dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir didalam Tabel Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Provinsi Riau berikut :

Tabel 3.2.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Provinsi Riau

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Provinsi Riau

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2022 (Tahun Rencana)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.0.02.02.0.	NON URUSAN				30.695.303.748,00				34.740.512.814,00
4.0.02.02.0.0.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				30.695.303.748,00				34.740.512.814,00
4.0.02.02.0.0.00.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 Persen	20.236.873.748,00			100 Persen	23.048.062.567,00
4.0.02.02.0.0.00.01.001.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	Kota Pekanbaru	246 surat	63.000.000	APBD		246 surat	66.150.000
4.0.02.02.0.0.00.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	Kota Pekanbaru	52 rekening	3.000.000.000	APBD		52 rekening	4.410.000.000
4.0.02.02.0.0.00.01.003.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Pekanbaru	60 Unit	30.000.000	APBD		60 Unit	33.075.000
4.0.02.02.0.0.00.01.004.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Pekanbaru	12 bulan	2.625.000.000	APBD		12 bulan	2.756.250.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2022 (Tahun Rencana)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.0.02.02.0.0.00.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Pekanbaru	56 unit	109.987.500	APBD		56 unit	115.486.875
4.0.02.02.0.0.00.01.007.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	Kota Pekanbaru	68 jenis	800.000.000	APBD		68 jenis	1.363.224.544
4.0.02.02.0.0.00.01.008.	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	Kota Pekanbaru	148 jenis	630.000.000	APBD		148 jenis	661.500.000
4.0.02.02.0.0.00.01.009.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Pekanbaru	24 Jenis	364.647.000	APBD		24 Jenis	606.375.000
4.0.02.02.0.0.00.01.010.	Penyediaan Makan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Kota Pekanbaru	286317 Porsi	5.045.841.000	APBD		286317 Porsi	5.174.989.194
4.0.02.02.0.0.00.01.011.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Luar Daerah	51 Kali	1.838.201.800	APBD		51 Kali	1.858.560.954
4.0.02.02.0.0.00.01.012.	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang Disediakan	Kota Pekanbaru	1484 OB	2.580.196.448	APBD		1484 OB	2.694.951.000
4.0.02.02.0.0.00.01.013.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga satpam yang disediakan	Kota Pekanbaru	720 OB	3.150.000.000	APBD		720 OB	3.307.500.000
4.0.02.02.0.0.00.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur		100 Persen	10.224.430.000,00			100 Persen	11.428.527.340,00
4.0.02.02.0.0.00.02.006.	Pengadaan Perengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan	Kota Pekanbaru	15 Unit	856.800.000	APBD		15 Unit	516.681.600
4.0.02.02.0.0.00.02.007.	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Kota Pekanbaru	2 Unit	300.000.000	APBD		2 Unit	513.600.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Tahun 2022 (Tahun Rencana)		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
			4	5	6	7	8	9	10
4.0.02.02.0.0.00.02.008.	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang diadakan	Kota Pekanbaru	15 Unit	385.000.000	APBD		15 Unit	1.160.725.740
4.0.02.02.0.0.00.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	Kota Pekanbaru	234 Unit	1.254.200.000	APBD		234 Unit	3.100.000.000
4.0.02.02.0.0.00.02.010.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	Kota Pekanbaru	4 Unit	2.750.000.000	APBD		4 Unit	1.155.600.000
4.0.02.02.0.0.00.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	Kota Pekanbaru	1 Unit	1.942.800.000	APBD		1 Unit	1.926.000.000
4.0.02.02.0.0.00.02.014.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Pekanbaru	35 Unit	1.995.630.000	APBD		35 Unit	2.182.800.000
4.0.02.02.0.0.00.02.015.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan rumah jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	Kota Pekanbaru	321 Unit	360.000.000	APBD		321 Unit	385.200.000
4.0.02.02.0.0.00.02.016.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kota Pekanbaru	388 Unit	380.000.000	APBD		388 Unit	487.920.000
4.0.02.02.0.0.00.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Tingkat Kehadiran ASN		100 Persen	234.000.000,00			100 Persen	263.922.907,00
4.0.02.02.0.0.00.03.001.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perengkapannya yang diadakan	Kota Pekanbaru	195 Stel	97.500.000	APBD		195 Stel	111.796.175
4.0.02.02.0.0.00.03.003.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	Kota Pekanbaru	195 Stel	136.500.000	APBD		195 Stel	152.126.732
4.0.02.02.4.	PENDUKUNG				202.768.563.542,00				244.520.188.853,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2022 (Tahun Rencana)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.0.02.02.4.0.02.4.0.02.	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				202.768.563.542,00				244.520.188.853,00
4.0.02.02.4.0.02.15.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Presentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		92 Persen	202.768.563.542,00			93 Persen	244.520.188.853,00
4.0.02.02.4.0.02.15.001.	Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kota Pekanbaru	10 Dokumen	2.785.060.000	APBD		10 Dokumen	6.808.580.000
4.0.02.02.4.0.02.15.002.	Penyusunan Ranperda inisiatif DPRD Provinsi Riau	Jumlah Ranperda inisiatif DPRD Provinsi Riau	Kota Pekanbaru	5 Ranperda Inisiatif DPRD	7.140.264.000	APBD		5 Ranperda Inisiatif DPRD	7.869.400.000
4.0.02.02.4.0.02.15.003.	Pembahasan rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang dibahas	Kota Pekanbaru	5 Ranperda	5.033.364.000	APBD		5 Ranperda	8.869.400.000
4.0.02.02.4.0.02.15.004.	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah rapat alat kelengkapan dewan yang dilaksanakan	Kota Pekanbaru	162 Kali	831.126.000	APBD		162 Kali	798.911.220
4.0.02.02.4.0.02.15.005.	Rapat-Rapat Paripurna	Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan	Kota Pekanbaru	61 Kali	1.043.060.000	APBD		61 Kali	1.144.900.000
4.0.02.02.4.0.02.15.006.	Reses Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah reses Pimpinan dan Anggota DPRD	Provinsi Riau	2 Kali	49.226.452.000	APBD		2 Kali	75.500.000.000
4.0.02.02.4.0.02.15.007.	Pembahasan LKPJ, APBD dan Perubahan APBD, Pertanggungjawaban APBD, serta Tindak Lanjut LHP BPK RI	Jumlah Perda dan rekomendasi	Kota Pekanbaru	5 Perda/Rekomendasi	8.524.338.000	APBD		5 Perda/Rekomendasi	8.809.232.358
4.0.02.02.4.0.02.15.008.	Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan	Dalam dan Luar Provinsi Riau	39 Kali	37.790.426.742	APBD		39 Kali	44.000.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2022 (Tahun Rencana)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.0.02.02.4.0.02.15.009.	Penyediaan Tenaga Ahli dan Advokasi	Jumlah Tenaga Ahli dan Advokasi yang disediakan	Kota Pekanbaru	71 Orang	6.264.000.000	APBD		71 Orang	5.784.000.000
4.0.02.02.4.0.02.15.010.	Penyediaan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Riau	Jumlah panipurna PAW Anggota DPRD Provinsi Riau	Kota Pekanbaru	3 Kali	226.134.000	APBD		3 Kali	308.670.765
4.0.02.02.4.0.02.15.011.	Pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan Jasa Perawatan Kesehatan (Medical Check Up)	Kota Pekanbaru	65 Orang	391.300.000	APBD		65 Orang	400.000.000
4.0.02.02.4.0.02.15.012.	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau	Jumlah kunjungan Pimpinan dan Anggota DPRD	Dalam dan Luar Provinsi Riau	47 Kali	24.647.691.600	APBD		47 Kali	33.000.000.000
4.0.02.02.4.0.02.15.013.	Penyelenggaraan Keprotokolan Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah agenda keprotokolan pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan	Kota Pekanbaru	195 Kali	2.451.824.800	APBD		195 Kali	1.717.350.000
4.0.02.02.4.0.02.15.014.	Penyediaan Logistik Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Rentang waktu ketersediaan logistik rumah tangga Pimpinan DPRD	Kota Pekanbaru	12 Bulan	2.640.000.000	APBD		12 Bulan	2.640.000.000
4.0.02.02.4.0.02.15.015.	Penyediaan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD yang disediakan	Kota Pekanbaru	325 Stel	985.000.000	APBD		325 Stel	1.314.000.000
4.0.02.02.4.0.02.15.016.	Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi dan Kehumasan Lembaga DPRD	Rentang waktu penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan	Kota Pekanbaru	12 Bulan	5.241.915.000	APBD		12 Bulan	5.724.500.000
4.0.02.02.4.0.02.15.017.	Hearing/Dialog dan Sosialisasi Peraturan Daerah	Jumlah Hearing/Dialog dan Sosialisasi perda yang dilakukan	Provinsi Riau	6 Kali	28.470.310.000	APBD		6 Kali	11.951.095.510

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2022 (Tahun Rencana)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.0.02.02.4.0.02.15.018.	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Dalam dan Luar Provinsi Riau	3 Kali	4.053.140.400	APBD		3 Kali	8.121.626.000
4.0.02.02.4.0.02.15.019.	Kunjungan Luar Negeri Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau	Jumlah Kunjungan Luar Negeri Pimpinan dan Anggota DPRD	Luar Negeri	1 Kali	13.018.829.000	APBD		1 Kali	18.164.643.000
4.0.02.02.4.0.02.15.020.	Konsultasi dan Pengurusan Kunjungan Luar Negeri Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah dokumen persyaratan kunjungan luar negeri Pimpinan dan Anggota DPRD	Luar Daerah	65 Dokumen	1.435.328.000	APBD		65 Dokumen	686.940.000
4.0.02.02.4.0.02.15.021.	Peningkatan Kapasitas layanan Kepada Lembaga DPRD	Jumlah jasa penunjang layanan tugas dan fungsi lembaga DPRD	Kota Pekanbaru	1 Laporan	40.000.000	APBD		1 Laporan	220.000.000
4.0.02.02.4.0.02.15.022.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Acara/Resepsi Pimpinan DPRD	Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan yang disewa	Kota Pekanbaru	5 Jenis	142.500.000	APBD		5 Jenis	228.980.000
4.0.02.02.4.0.02.15.023.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah koran/majalah dan peraturan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD	Kota Pekanbaru	68400 Eks	386.500.000	APBD		68400 Eks	457.960.000
J U M L A H					233.463.867.290,00				279.260.701.667,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan rencana Program dan Kegiatan yang tertuang pada RKPD Provinsi Riau Tahun 2021, maka disusun rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagaimana tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Provinsi Riau

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Provinsi Riau

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perkiraan Maju Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Tahun 2022 (Tahun Rencana)		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Tahun n	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Tahun n+1
1		3	4	5	6	7	8	9	10
4.0.02.02.0.	NON URUSAN				30.695.303.748,00				34.740.512.814,00
4.0.02.02.0.0.	NON URUSAN				30.695.303.748,00				34.740.512.814,00
4.0.02.02.0.0.00.	NON URUSAN				30.695.303.748,00				34.740.512.814,00
4.0.02.02.0.0.00.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 Persen	20.236.873.748,00			100 Persen	23.048.062.567,00
4.0.02.02.0.0.00.01.001.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	Kota Pekanbaru	246 surat	63.000.000	APBD		246 surat	66.150.000
4.0.02.02.0.0.00.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	Kota Pekanbaru	52 rekening	3.000.000.000	APBD		52 rekening	4.410.000.000
4.0.02.02.0.0.00.01.003.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Pekanbaru	60 Unit	30.000.000	APBD		60 Unit	33.075.000
4.0.02.02.0.0.00.01.004.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Pekanbaru	12 bulan	2.625.000.000	APBD		12 bulan	2.756.250.000
4.0.02.02.0.0.00.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Pekanbaru	56 unit	109.987.500	APBD		56 unit	115.486.875
4.0.02.02.0.0.00.01.007.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	Kota Pekanbaru	68 jenis	800.000.000	APBD		68 jenis	1.363.224.544

No	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perkiraan Maju Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2022 (Tahun Rencana)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Tahun n	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Tahun n+1
4.0.02.02.0.0.00.01.008.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	Kota Pekanbaru	148 jenis	630.000.000	APBD	148 jenis	661.500.000	
4.0.02.02.0.0.00.01.009.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Pekanbaru	24 Jenis	364.647.000	APBD	24 Jenis	606.375.000	
4.0.02.02.0.0.00.01.010.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Kota Pekanbaru	286317 Porsi	5.045.841.000	APBD	286317 Porsi	5.174.989.194	
4.0.02.02.0.0.00.01.011.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Luar Daerah	51 Kali	1.838.201.800	APBD	51 Kali	1.858.560.954	
4.0.02.02.0.0.00.01.012.	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang Disediakan	Kota Pekanbaru	1484 OB	2.580.196.448	APBD	1484 OB	2.694.951.000	
4.0.02.02.0.0.00.01.013.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga satpam yang disediakan	Kota Pekanbaru	720 OB	3.150.000.000	APBD	720 OB	3.307.500.000	
4.0.02.02.0.0.00.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur		100 Persen	10.224.430.000,00		100 Persen	11.428.527.340,00	
4.0.02.02.0.0.00.02.006.	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan	Kota Pekanbaru	15 Unit	856.800.000	APBD	15 Unit	516.681.600	
4.0.02.02.0.0.00.02.007.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Kota Pekanbaru	2 Unit	300.000.000	APBD	2 Unit	513.600.000	
4.0.02.02.0.0.00.02.008.	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang diadakan	Kota Pekanbaru	15 Unit	385.000.000	APBD	15 Unit	1.160.725.740	
4.0.02.02.0.0.00.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	Kota Pekanbaru	234 Unit	1.254.200.000	APBD	234 Unit	3.100.000.000	
4.0.02.02.0.0.00.02.010.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	Kota Pekanbaru	4 Unit	2.750.000.000	APBD	4 Unit	1.155.600.000	
4.0.02.02.0.0.00.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	Kota Pekanbaru	1 Unit	1.942.800.000	APBD	1 Unit	1.926.000.000	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perkiraan Maju Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Tahun 2022 (Tahun Rencana)		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Tahun n	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Tahun n+1
4.0.02.02.0.0.00.02.014.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Pekanbaru	35 Unit	1.995.630.000	APBD		35 Unit	2.182.800.000
4.0.02.02.0.0.00.02.015.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan rumah jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	Kota Pekanbaru	321 Unit	360.000.000	APBD		321 Unit	385.200.000
4.0.02.02.0.0.00.02.016.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kota Pekanbaru	388 Unit	380.000.000	APBD		388 Unit	487.920.000
4.0.02.02.0.0.00.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Tingkat Kehadiran ASN		100 Persen	234.000.000,00			100 Persen	263.922.907,00
4.0.02.02.0.0.00.03.001.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Kota Pekanbaru	195 Stel	97.500.000	APBD		195 Stel	111.796.175
4.0.02.02.0.0.00.03.003.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	Kota Pekanbaru	195 Stel	136.500.000	APBD		195 Stel	152.126.732
4.0.02.02.4.	PENDUKUNG				202.768.563.542,00				244.520.188.853,00
4.0.02.02.4.0.	PENDUKUNG				202.768.563.542,00				244.520.188.853,00
4.0.02.02.4.0.02.	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				202.768.563.542,00				244.520.188.853,00
4.0.02.02.4.0.02.15.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Presentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		92 Persen	202.768.563.542,00			93 Persen	244.520.188.853,00
4.0.02.02.4.0.02.15.001.	Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kota Pekanbaru	10 Dokumen	2.785.060.000	APBD		10 Dokumen	6.808.580.000
4.0.02.02.4.0.02.15.002.	Penyusunan Ranperda inisiatif DPRD Provinsi Riau	Jumlah Ranperda inisiatif DPRD Provinsi Riau	Kota Pekanbaru	5 Ranperda Inisiatif DPRD	7.140.264.000	APBD		5 Ranperda Inisiatif DPRD	7.869.400.000
4.0.02.02.4.0.02.15.003.	Pembahasan rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang dibahas	Kota Pekanbaru	5 Ranperda	5.033.364.000	APBD		5 Ranperda	8.869.400.000
4.0.02.02.4.0.02.15.004.	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah rapat alat kelengkapan dewan yang	Kota Pekanbaru	162 Kali	831.126.000	APBD		162 Kali	798.911.220

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perkiraan Maju Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Tahun 2022 (Tahun Rencana)		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Tahun n	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Tahun n+1
		dilaksanakan							
4.0.02.02.4.0.02.15.005.	Rapat-Rapat Paripurna	Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan	Kota Pekanbaru	61 Kali	1.043.060.000	APBD		61 Kali	1.144.900.000
4.0.02.02.4.0.02.15.006.	Reses Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah reses Pimpinan dan Anggota DPRD	Provinsi Riau	2 Kali	49.226.452.000	APBD		2 Kali	75.500.000.000
4.0.02.02.4.0.02.15.007.	Pembahasan LKPJ, APBD dan Perubahan APBD, Pertanggungjawaban APBD, serta Tindak Lanjut LHP BPK RI	Jumlah Perda dan rekomendasi	Kota Pekanbaru	5 Perda/ Rekomendasi	8.524.338.000	APBD		5 Perda/ Rekomendasi	8.809.232.358
4.0.02.02.4.0.02.15.008.	Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan	Dalam dan Luar Provinsi Riau	39 Kali	37.790.426.742	APBD		39 Kali	44.000.000.000
4.0.02.02.4.0.02.15.009.	Penyediaan Tenaga Ahli dan Advokasi	Jumlah Tenaga Ahli dan Advokasi yang disediakan	Kota Pekanbaru	71 Orang	6.264.000.000	APBD		71 Orang	5.784.000.000
4.0.02.02.4.0.02.15.010.	Penyediaan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Riau	Jumlah paripurna PAW Anggota DPRD Provinsi Riau	Kota Pekanbaru	3 Kali	226.134.000	APBD		3 Kali	308.670.765
4.0.02.02.4.0.02.15.011.	Pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan Jasa Perawatan Kesehatan (Medical Check Up)	Kota Pekanbaru	65 Orang	391.300.000	APBD		65 Orang	400.000.000
4.0.02.02.4.0.02.15.012.	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau	Jumlah kunjungan Pimpinan dan Anggota DPRD	Dalam dan Luar Provinsi Riau	47 Kali	24.647.691.600	APBD		47 Kali	33.000.000.000
4.0.02.02.4.0.02.15.013.	Penyelenggaraan Keprotokolan Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah agenda keprotokolan pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan	Kota Pekanbaru	195 Kali	2.451.824.800	APBD		195 Kali	1.717.350.000
4.0.02.02.4.0.02.15.014.	Penyediaan Logistik Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Rentang waktu ketersediaan logistik rumah tangga Pimpinan DPRD	Kota Pekanbaru	12 Bulan	2.640.000.000	APBD		12 Bulan	2.640.000.000
4.0.02.02.4.0.02.15.015.	Penyediaan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD yang disediakan	Kota Pekanbaru	325 Stel	985.000.000	APBD		325 Stel	1.314.000.000

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perkiraan Maju Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Tahun 2022 (Tahun Rencana)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Tahun n	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Tahun n+1
4.0.02.02.4.0.02.15.016.	Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi dan Kehumasan Lembaga DPRD	Rentang waktu penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan	Kota Pekanbaru	12 Bulan	5.241.915.000	APBD	12 Bulan	5.724.500.000
4.0.02.02.4.0.02.15.017.	Hearing/Dialog dan Sosialisasi Peraturan Daerah	Jumlah Hearing/Dialog dan Sosialisasi perda yang dilakukan	Provinsi Riau	6 Kali	28.470.310.000	APBD	6 Kali	11.951.095.510
4.0.02.02.4.0.02.15.018.	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Dalam dan Luar Provinsi Riau	3 Kali	4.053.140.400	APBD	3 Kali	8.121.626.000
4.0.02.02.4.0.02.15.019.	Kunjungan Luar Negeri Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau	Jumlah Kunjungan Luar Negeri Pimpinan dan Anggota DPRD	Luar Negeri	1 Kali	13.018.829.000	APBD	1 Kali	18.164.643.000
4.0.02.02.4.0.02.15.020.	Konsultasi dan Pengurusan Kunjungan Luar Negeri Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah dokumen persyaratan kunjungan luar negeri Pimpinan dan Anggota DPRD	Luar Daerah	65 Dokumen	1.435.328.000	APBD	65 Dokumen	686.940.000
4.0.02.02.4.0.02.15.021.	Peningkatan Kapasitas layanan Kepada Lembaga DPRD	Jumlah jasa penunjang layanan tugas dan fungsi lembaga DPRD	Kota Pekanbaru	1 Laporan	40.000.000	APBD	1 Laporan	220.000.000
4.0.02.02.4.0.02.15.022.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Acara/Resepsi Pimpinan DPRD	Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan yang disewa	Kota Pekanbaru	5 Jenis	142.500.000	APBD	5 Jenis	228.980.000
4.0.02.02.4.0.02.15.023.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah koran/majalah dan peraturan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD	Kota Pekanbaru	68400 Eks	386.500.000	APBD	68400 Eks	457.960.000
J U M L A H					233.463.867.290,00			279.260.701.667,00

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2021 merupakan Dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi Riau yang disusun dengan mengacu pada Surat Edaran Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah

Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Sekretariat DPRD Provinsi Riau untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolok ukur bagi proses pencapaian keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Renja Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2021 diharapkan mampu menjadi pedoman dan acuan penyelenggaraan program dan kegiatan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Sekretariat DPRD Provinsi Riau pada tahun 2021.

Pada tahun 2021 Sekretariat DPRD Provinsi Riau telah menetapkan 4 (empat) program, dan selanjutnya program yang ditempuh akan diimplementasikan dalam kegiatan. Keluaran dan hasil kegiatan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2021 ini disusun, semoga dapat menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja berikutnya.

Pekanbaru, 18 Agustus 2020

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI RIAU**



MUFLIHUN, S.STP, M.AP
Pembina Tingkat I
NIP. 19780222 199701 1 001

**TABEL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI RIAU TAHUN 2021**

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DEWAN

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	CATATAN VERIFIKASI BIDANG
1.	BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD	Mengemukakan proses penyusunan Renja PD dan keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD , Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota (copas panduan penyusunan renja)
	1.2 Dasar Hukum	Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> - Memasukan perda 3 Tahun 2019 tentang RPJM - perda 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 - pergub 42 2019 tentang rencana strategis - No 20. di update Pergub tentang rencana Kerja Pemerintah Daerah 2021 (pergub 43/2020) - Dapat disesuaikan dengan panduan
	1.3 Maksud dan Tujuan	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah	Maksud dan tujuan dapat disesuaikan dengan panduan yang diberikan
	1.4 Sistematika Penulisan	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.	Menguraikan pokok bahasan, dapat disesuaikan dengan panduan yang diberikan
2.	BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019	
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	<p>Berisikan uraian mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan 	<p>sesuai</p> <p>sesuai</p> <p>sesuai</p> <p>sesuai</p> <p>sesuai</p>

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	CATATAN VERIFIKASI BIDANG
		6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, dan	sesuai
		7. Lampirkan tabel berikut, Tabel T-C.29	Tabel 2.3 diubah menjadi Table T-C29 mengacu pada permendagri 86/2017 Dapat diambil dari Simonev
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK. 2. Lampirkan tabel berikut, Tabel T-C.30 	<p>Tabel 2.4 diubah menjadi Table T-C30 serta narasi penjelasan terhadap table, mengacu pada permendagri 86/2017 Dapat dilihat dalam renstra OPD T-C23</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buat tabel capaian indikator penyelenggaraan urusan pemerintahan - Buat tabel capaian indikator kinerja pelayanan umum
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD; 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD; 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (<i>Sustainable Development Goals</i>); 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. 	<p>sesuai</p> <p>sesuai</p> <p>sesuai</p> <p>sesuai</p> <p>sesuai</p>
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	<p>Berisikan uraian mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan 4. Lampirkan tabel berikut, Tabel T-C.31 	<p>sesuai</p> <p>sesuai</p> <p>sesuai</p> <p>Table 2.5 diubah menjadi Table T-C31 membutuhkan penyesuaian, mengacu pada</p>

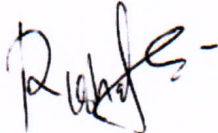
NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	CATATAN VERIFIKASI BIDANG
			permendagri 86/2017 (12 kolom)
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	<p>Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; 3. Sajikan Tabel T-C.32 	<p>Table T-C32 mengacu pada permendagri 86/2017 (6 kolom)</p> <p>Sekwan tdk mempunyai program kegiatan yang terkait dengan masyarakat, namun tetap dibuat Bab 2.5 dengan menjelaskan pada narasi bahwa tidak ada program dan kegiatan yang terkait dengan masyarakat.</p>
3	BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	sesuai
	3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah	sesuai
	3.3 Program dan Kegiatan	1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.	sesuai
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan		sesuai	
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.		Belum terdapat penjelasan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD	
4. Lampirkan tabel berikut, Tabel T-C.33		Tabel 3.2 diubah menjadi Table T-C33 mengacu pada permendagri 86/2017 (10 kolom)	
4	BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
		Diambil dari Sistem i-Planning pada pada Tahapan Final RKPD	sesuai

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	CATATAN VERIFIKASI BIDANG
5	BAB V	PENUTUP	
		Berisikan uraian penutup :	sesuai
		1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;	
		2. Kaidah-kaidah pelaksanaan;	sesuai
		3. Rencana tindak lanjut;	sesuai
		4. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap perangkat daerah yang bersangkutan.	Sesuai

Mengetahui,
Kepala Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia

HERIMANTO, S.Hut, MT
NIP. 19711126 199803 1 006

Verifikator,
Fungsional Perencana Pertama


RAISA WISUDAWATI
NIP. 19901225 201010 2 001

PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
DENGAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH
TAHUN

: SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU
: 2021

RENJA PD TAHUN 2021							PERMENDAGRI 90/2019								
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Disisi dari i-Planning)	PROGRAM (Disisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Disisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH															
	4.0.02.02.0.0.00.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran			X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
	4.0.02.02.0.0.00.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur			X XX 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
	4.0.02.02.0.0.00.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		Persentase Tingkat Kehadiran ASN			X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
							X XX 01 1.03		Administrasi Umum		Jumlah kegiatan pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	22 Kegiatan			
	4.0.02.02.0.0.00.01.001.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	246 surat	63.000.000,00	X XX 01 1.03 01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	246 surat	63.000.000,00		
	4.0.02.02.0.0.00.01.002.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	52 rekening	3.000.000.000,00	X XX 01 1.03 02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	52 rekening	3.000.000.000,00		
	4.0.02.02.4.0.02.15.022.		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Acara/Resepsi Pimpinan DPRD	Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan yang disewa	5 Jenis	142.500.000,00	X XX 01 1.03 03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan yang disewa	5 Jenis	142.500.000,00		
	4.0.02.02.0.0.00.01.006.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	56 unit	109.987.500,00	X XX 01 1.03 06			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	56 unit	109.987.500,00		
	4.0.02.02.0.0.00.01.012.		Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang Disediakan	1484 OB	2.566.539.200,00	X XX 01 1.03 07			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1. Jumlah Tenaga Administrasi yang Disediakan; 2. Jumlah tenaga satpam yang disediakan	1484 OB	2.580.196.448,00		
	4.0.02.02.0.0.00.01.004.		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	2.625.000.000,00	X XX 01 1.03 08			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	2.625.000.000,00		
	4.0.02.02.0.0.00.01.007.		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	68 jenis	800.000.000,00	X XX 01 1.03 10			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	68 jenis	800.000.000,00		
	4.0.02.02.0.0.00.01.008.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	148 jenis	630.000.000,00	X XX 01 1.03 11			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	148 jenis	630.000.000,00		
	4.0.02.02.0.0.00.01.009.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	24 Jenis	364.647.000,00	X XX 01 1.03 12			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	24 Jenis	364.647.000,00		
	4.0.02.02.0.0.00.01.003.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60 Unit	30.000.000,00	X XX 01 1.03 13			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60 Unit	30.000.000,00		
	4.0.02.02.4.0.02.15.023.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah koran/majalah dan peraturan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD	68400 Eks	386.500.000,00	X XX 01 1.03 15			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah koran/majalah dan peraturan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD	68400 Eks	386.500.000,00		
	4.0.02.02.0.0.00.01.010.		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	286317 Porsi	5.045.841.000,00	X XX 01 1.03 17			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	286317 Porsi	5.045.841.000,00		
	4.0.02.02.0.0.00.01.011.		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	51 Kali	1.838.201.800,00	X XX 01 1.03 18			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	51 Kali	1.838.201.800,00		
	4.0.02.02.0.0.00.02.006.		Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan	15 Unit	856.800.000,00	X XX 01 1.03 22			Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan	15 Unit	856.800.000,00		
	4.0.02.02.0.0.00.02.007.		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	2 Unit	300.000.000,00	X XX 01 1.03 23			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	2 Unit	300.000.000,00		

REJENJA PD TAHUN 2021							PERMENDAGRI 90/2019							KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Disi dari I-Planning)	PROGRAM (Disi dari Renja PD)	KEGIATAN (Disi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.0.02.02.0.0.00.02.008.		Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang diadakan	15 Unit	385.000.000,00	X XX 01 1.03 24			Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang diadakan	15 Unit	385.000.000,00		
	4.0.02.02.0.0.00.02.009.		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	234 Unit	1.254.200.000,00	X XX 01 1.03 25			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	234 Unit	1.254.200.000,00		
	4.0.02.02.0.0.00.02.010.		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	4 Unit	2.750.000.000,00	X XX 01 1.03 27			Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	4 Unit	2.750.000.000,00		
	4.0.02.02.0.0.00.02.012.		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	1.942.800.000,00	X XX 01 1.03 29			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	1.942.800.000,00		
	4.0.02.02.0.0.00.02.014.		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	35 Unit	1.995.630.000,00	X XX 01 1.03 31			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	35 Unit	1.995.630.000,00		
	4.0.02.02.0.0.00.02.015.		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan rumah jabatan/Dinas	Jumlah perengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	321 Unit	360.000.000,00	X XX 01 1.03 32			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	321 Unit	360.000.000,00		
	4.0.02.02.0.0.00.02.016.		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	388 Unit	380.000.000,00	X XX 01 1.03 35			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	388 Unit	380.000.000,00		
							X XX 01 1.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Jumlah kegiatan peningkatan disiplin dan kapasitas SDA yang dilaksanakan	2 Kegiatan			
	4.0.02.02.0.0.00.03.001.		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya yang diadakan	Jumlah pakaian dinas beserta perengkapannya yang diadakan	195 Stel	97.500.000,00	X XX 01 1.04 02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya yang diadakan	Jumlah pakaian dinas beserta perengkapannya yang diadakan	195 Stel	97.500.000,00		
	4.0.02.02.0.0.00.03.003.		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	195 Stel	136.500.000,00	X XX 01 1.04 05			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	195 Stel	136.500.000,00		
URUSAN PENDUKUNG															
	4.0.02.02.4.0.02.15.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			4 02 02	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN			Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah				
							4 02 02 1.01		Layanan Administrasi DPRD		Jumlah Layanan Administrasi DPRD	4 Layanan			
	4.0.02.02.4.0.02.15.013.		Penyelenggaraan Keprotokolan Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah agenda keprotokolan pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan	195 Kali	2.451.824.800,00	4 02 02 1.01 01			Penyelenggaraan Administrasi, Ketertarikan Dan Kepengawasan DPRD	Jumlah Penyelenggaraan Administrasi, Ketertarikan Dan Kepengawasan DPRD	195 kali	2.451.824.800,00		
	4.0.02.02.4.0.02.15.021.		Peningkatan Kapasitas Layanan Kepada Lembaga DPRD	Jumlah jasa penunjang layanan tugas dan fungsi lembaga DPRD	1 Laporan	40.000.000,00									
	4.0.02.02.4.0.02.15.004.		Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah rapat alat kelengkapan dewan yang dilaksanakan	162 Kali	831.126.000,00	4 02 02 1.01 02			Fasilitas Rapat DPRD	Jumlah fasilitas rapat DPRD	226 kali	2.100.320.000,00		
	4.0.02.02.4.0.02.15.005.		Rapat-Rapat Paripurna	Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan	61 Kali	1.043.060.000,00									
	4.0.02.02.4.0.02.15.010.		Penyediaan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Riau	Jumlah pengganti PAW Anggota DPRD Provinsi Riau	3 Kali	226.134.000,00									
	4.0.02.02.4.0.02.15.014.		Penyediaan Logistik Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Rentang waktu ketersediaan logistik rumah tangga Pimpinan DPRD	12 Bulan	2.640.000.000,00	4 02 02 1.01 04			Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Rentang waktu ketersediaan logistik rumah tangga Pimpinan DPRD	12 Bulan	2.640.000.000,00		
	4.0.02.02.4.0.02.15.017.		Hearing/Dialog dan Sosialisasi Peraturan Daerah	Jumlah Hearing/Dialog dan Sosialisasi perda yang dilakukan	6 Kali	28.470.310.000,00	4 02 02 1.01 07			Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	6 Kali	28.470.310.000,00		
							4 02 02 1.02		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Jumlah Layanan Kesejahteraan DPRD	2 Layanan			
	4.0.02.02.4.0.02.15.015.		Penyediaan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD yang disediakan	325 Stel	985.000.000,00	4 02 02 1.02 02			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	325 Stel	985.000.000,00		
	4.0.02.02.4.0.02.15.011.		Pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan Jasa Perawatan Kesehatan (Medical Check Up)	65 Orang	391.300.000,00	4 02 02 1.02 03			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan Medical Check Up	65 Orang	391.300.000,00		

RENTAN TAHUN 2021							PERMENDAGRI 90/2019							KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Disi dari i-Planning)	PROGRAM (Disi dari Renja PD)	KEGIATAN (Disi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.00.02.02.4.0.02.15.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			4 02 03	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			Persentase Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD				
							4 02 03 1.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD		Jumlah Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	10 Perda			
	4.00.02.02.4.0.02.15.001.		Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Program Pembentukan Peraturan Daerah	10 Dokumen	2.785.060.000,00	4 02 03 1.01 01			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	10 Dokumen	2.785.060.000,00		
	4.00.02.02.4.0.02.15.002.		Penyusunan Ranperda Inisiatif DPRD Provinsi Riau	Jumlah Ranperda inisiatif DPRD Provinsi Riau	5 Ranperda Inisiatif DPRD	7.140.264.000,00	4 02 03 1.01 02			Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 Ranperda	12.173.628.000,00		
	4.00.02.02.4.0.02.15.003.		Pembahasan rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang dibahas	5 Ranperda	5.033.364.000,00									
							4 02 03 1.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran		Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran	5 Perda			
	4.00.02.02.4.0.02.15.007.		Pembahasan LKPI, APBD dan Perubahan APBD, Pertanggungjawaban APBD, serta Tidak Lanjut LHP BPK RI	Jumlah Perda dan rekomendasi	5 Perda/ Rekomendasi	8.524.338.000,00	4 02 03 1.02 03		Pembahasan APBD	Pembahasan APBD	Jumlah Perda APBD	1 Perda	1.693.554.000,00		
			Pembahasan LKPI, APBD dan Perubahan APBD, Pertanggungjawaban APBD, serta Tidak Lanjut LHP BPK RI	Jumlah Perda dan rekomendasi			4 02 03 1.02 04		Pembahasan APBD Perubahan	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Perda APBD Perubahan	1 Perda	1.693.554.000,00		
			Pembahasan LKPI, APBD dan Perubahan APBD, Pertanggungjawaban APBD, serta Tidak Lanjut LHP BPK RI	Jumlah Perda dan rekomendasi			4 02 03 1.02 06		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Perda Pertanggungjawaban APBD dan Rekomendasi LHP serta Tidak Lanjut LHP BPK RI	3 Perda/ Rekomendasi	5.137.230.000,00		
							4 02 03 1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD		Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD	5 Pelaksanaan			
	4.00.02.02.4.0.02.15.018.		Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Kali	4.053.140.400,00	4 02 03 1.04 02		Bimbingan Teknis DPRD	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Kali	4.053.140.400,00		
	4.00.02.02.4.0.02.15.016.		Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi dan Kehumasan Lembaga DPRD	Rentang waktu penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan	12 Bulan	5.241.915.000,00	4 02 03 1.04 03		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Rentang waktu penyediaan jasa publikasi dan dokumentasi dewan	12 Bulan	4.588.197.000,00		
	4.00.02.02.4.0.02.15.009.		Penyediaan Tenaga Ahli dan Advokasi	Jumlah Tenaga Ahli dan Advokasi yang disediakan	71 Orang	6.264.000.000,00	4 02 03 1.04 04		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	63 Orang	5.400.000.000,00		
			Penyediaan Tenaga Ahli dan Advokasi	Jumlah Tenaga Ahli dan Advokasi yang disediakan			4 02 03 1.04 05		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	864.000.000,00		
			Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi dan Kehumasan Lembaga DPRD	Rentang waktu penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan			4 02 03 1.04 06		Penyenggaraan Hubungan Masyarakat	Penyenggaraan Hubungan Masyarakat	Rentang waktu Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Bulan	653.718.000,00		
							4 02 03 1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Jumlah Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	20 Kali			
	4.00.02.02.4.0.02.15.008.		Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan	39 Kali	37.790.426.742,00	4 02 03 1.05 01			Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD	11 Kali	4.582.001.600,00		
			Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau	Jumlah kunjungan Pimpinan dan Anggota DPRD								7 kali	1.312.717.600,00		
	4.00.02.02.4.0.02.15.006.		Reses Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah reses Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Kali	49.226.452.000,00	4 02 03 1.05 03			Pelaksanaan Reses	Jumlah Pelaksanaan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Kali	49.226.452.000,00		
							4 02 03 1.08		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Jumlah Fasilitasi Tugas DPRD	75 Kali			
			Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan			4 02 03 1.08 01			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	25 kali	33.208.425.142,00		

RENJA PD TAHUN 2021							PERMENDAGRI 90/2019								
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Diisi dari +Planning)	PROGRAM (Diisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Diisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.00.02.02.4.0.02.15.012.		Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau	Jumlah kunjungan Pimpinan dan Anggota DPRD	47 kali	24.647.691.600,00						47 kali	21.617.336.000,00		
	4.00.02.02.4.0.02.15.019.		Kunjungan Luar Negeri Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau	Jumlah Kunjungan luar negeri Pimpinan dan Anggota DPRD	1 kali	13.018.829.000,00						1 kali	13.018.829.000,00		
	4.00.02.02.4.0.02.15.020.		Konsultasi dan Pengurusan Kunjungan Luar Negeri Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah dokumen persyaratan kunjungan luar negeri Pimpinan dan Anggota DPRD	65 Dokumen	1.435.328.000,00							1.435.328.000,00		
			Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau	Jumlah kunjungan Pimpinan dan Anggota DPRD			4.02.03.1.08.03			Pelaksanaan Uedangan DPRD	Jumlah Pelaksanaan Undangn DPRD yang dihadin	2 kali	1.717.638.000,00		
JUMLAH						230.300.210.042,00	JUMLAH						230.313.867.290,00		

Pekanbaru, 30 Juni 2020
 SEKRETARIS DPRD PROVINSI RIAU



MUFLIHUN, S.STI, M.AP
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19780222 199701 1 001

**DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
YANG TIDAK TERPETAKAN BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

PERANGKAT DAERAH
TAHUN

: SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU
: 2021

RENJA PD TAHUN 2021							KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Diisi dari i-Planning))	PROGRAM (Diisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Diisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								
	4.0.02.02.0.0.00.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	4.0.02.02.0.0.00.01.013.		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga satpam yang disediakan	720 OB	3.150.000.000,00		
URUSAN PENDUKUNG								
JUMLAH						3.150.000.000,00		

Pekanbaru, 30 Juni 2020
SEKRETARIS DPRD PROVINSI RIAU


MUFLIHUN, S.STP, M.AP
Pembina Tingkat I
NIP. 19780222 199701 1 001